

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran sektor transportasi mempunyai korelasi positif dengan pembangunan ekonomi suatu negara, semakin maju tingkat kegiatan suatu negara tuntutan akan kebutuhan transportasi akan semakin besar pula (Morlok, 1995). Hal ini disebabkan karena transportasi menjalankan fungsinya sebagai penggerak pembangunan (*the promoting function*) dan sebagai pemberi jasa (*the serving function*), seperti melayani kegiatan-kegiatan nyata terutama dalam bidang ekonomi (Widawati, 2002). Untuk mewujudkan fungsi transportasi yang optimal perlu diwujudkan sistem transportasi yang berkualitas.

Sistem transportasi yang berkualitas diperlukan untuk menunjang perkembangan kegiatan sektor-sektor lain dan mendorong berkembangnya daerah-daerah yang relatif tertinggal, terisolasi, terpencil serta daerah-daerah yang terletak diperbatasan (Adisasmita, 2011). Untuk mendukung terciptanya sistem transportasi yang berkualitas memerlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya ialah terminal. Hal tersebut disebabkan karena terminal merupakan salah satu prasarana penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 disebutkan bahwa terminal berfungsi sebagai sarana penunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda. Namun, pada kondisi lapangan khususnya di Pulau Jawa, ditemukan permasalahan terkait dengan terminal antara lain ketidaktepatan waktu kedatangan dan kepergian serta ketidakteraturan sistem *ticketing*. Permasalahan di terminal tersebut berhubungan erat dengan permasalahan yang ada di jalan arteri yaitu jalan Pantai Utara Pulau Jawa.

Jalan Pantura memiliki banyak permasalahan yang berimbas pada tidak berfungsinya terminal secara optimal, diantaranya berkaitan dengan mobilitas

kendaraan yang dihambat oleh adanya *traffic light* yang menyebabkan *lossing time* bagi kendaraan sehingga waktu tempuh angkutan jalan bertambah. Selain dari faktor *traffic light* dan penggunaan bahu jalan sebagai tempat berjualan bagi para pedagang pasar tumpah berdampak pada pula pada penurunan kecepatan yang berimbas pada bertambahnya waktu tempuh dalam bertransportasi (news.Liputan6.com diakses pada 3/6/2016 pukul 12:26 WIB). Hal inilah yang menyebabkan ketidakpastian kedatangan angkutan jalan di terminal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan di jalan Pantura maka pemerintah Indonesia menggalakan program pembangunan jalan tol lintas pulau Jawa, yaitu program *Trans Java Tollway System*.

Jalan Tol merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghubungkan antar daerah dengan memberikan pelayanan yang tinggi dan waktu tempuh yang lebih singkat. *Trans Java Tollway System* ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan transportasi darat khususnya di pulau Jawa. Dampak positif dari program jalan tol Trans Jawa mulai dirasakan dengan tersambungannya jalan tol dari Jakarta – Cirebon, sebelum jalan tol tersebut tersambung membutuhkan waktu 3 (tiga) hari untuk mengangkut logistik dari Jakarta ke Surabaya, namun setelah tersambung hanya membutuhkan waktu 1-2 hari (Bisnis.Liputan6.com diakses pada 20/8/2015 pukul 20:26 WIB).

Namun di sisi lain, program pembangunan jalan tol Trans Jawa bukan hanya memberikan dampak positif bagi pengguna jalan, namun juga memberikan dampak negatif bagi pengusaha yang berada di sepanjang jalan Pantura. Hasil survei dampak Tol Cipali oleh Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPWBI) Cirebon mengungkapkan sedikitnya 70 % usaha di Jalan Pantura Cirebon gulung tikar, selain itu pengoperasian jalan tol juga menurunkan omzet SPBU yang beroperasi di sepanjang pantura hingga 70% dan menurunkan pendapatan rumah makan antara 20-39 % (Liputan6.com diakses pada 30/12/2015 pukul 09:06). Hal ini diakibatkan oleh pengguna jalan lebih memilih menggunakan *Trans Java Tollway System* dari pada jalan Pantura.

Pengguna jalan yang beralih dari jalan Pantura ke jalan tol Trans Jawa tentu saja bukan hanya para pengguna kendaraan pribadi, namun juga kendaraan barang berupa truk dan kendaraan umum berupa bus. Peralihan rute bus yang menggunakan *Trans Java Tollway System* berdampak pada pengelolaan terminal tipe A yang melayani angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Salah satu dampak ialah maraknya pelanggaran naik turun penumpang di jalan tol, dari 1.519 pelanggaran lalu lintas 464 pelanggaran diantaranya merupakan pelanggaran naik turun penumpang (www.poskotanews.com diakses pada 30/5/2016 pukul 21:59).

Selain permasalahan di dalam jalan tol yang marak terjadi pelanggaran naik turun penumpang, permasalahan lain juga muncul di akses jalan tol. Di akses jalan tol seringkali muncul terminal bayangan yang *notabene* ilegal. Meski terminal bayangan tidak resmi dan dianggap membahayakan arus jalan tol, bagi sebagian warga terminal bayangan dianggap sangat efisien dan menghemat waktu (www.merdeka.com diakses pada 28/7/2012 pukul 01:23). Permasalahan terkait dengan tidak terintegrasi terminal dengan jalan tol tersebut juga terjadi di Kabupaten Bandung. Hal ini diakibatkan oleh dampak adanya jalan tol Cileunyi yang melintasi Kabupaten Bandung dan berujung di Kecamatan Cileunyi. Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul penelitian "**KONSEP INTEGRASI TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN DENGAN JALAN TOL**".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Di ruas jalan tol terdapat pelanggaran baik di badan jalan berupa naik turun penumpang maupun di akses jalan tol berupa adanya kegiatan terminal bayangan. Pelanggaran penumpang angkutan jalan di jalan tol disebabkan oleh terminal penumpang angkutan jalan tidak berfungsi optimal dalam menunjang keterpaduan (integrasi) dengan jalan tol.

2. Diperlukan konsep integrasi terminal dengan jalan tol yang tepat untuk mengakomodasi penumpang pada jalan tol sehingga penumpang dapat terjamin keselamatan dan keamanan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas diperoleh beberapa permasalahan mengenai integrasi terminal penumpang angkutan umum dengan jalan tol antara lain :

1. Bagaimana permasalahan angkutan umum di jalan tol Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana konsep integrasi terminal penumpang angkutan jalan dengan jalan tol yang paling tepat untuk diterapkan di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan integrasi terminal dengan jalan tol di Kabupaten Bandung.
- b. Menyusun dan menentukan konsep integrasi terminal penumpang angkutan jalan dengan jalan tol di Kabupaten Bandung berdasarkan urban desain terminal dan *Transit Oriented Development* serta mengacu pada konsep integrasi yang telah diterapkan di wilayah lain di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh :

- a. Kementerian Perhubungan, sebagai langkah peningkatan pelayanan terminal sehingga dapat mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan.
- b. Masyarakat, sebagai sarana informasi terminal penumpang yang terintegrasi dengan jalan tol.
- c. Civitas Akademika, sebagai sarana ilmu pengetahuan dalam bidang *sustainability transport* terminal penumpang angkutan jalan dan jalan tol.

- d. Peneliti, sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan upaya integrasi terminal penumpang angkutan jalan dengan jalan tol.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah di atas perlu adanya batasan masalah agar permasalahan yang akan dibahas dapat mengerucut dan jelas dalam pembuatan konsep ini. Adapun pembatasan masalah terkait konsep integrasi penumpang angkutan jalan dengan jalan tol meliputi :

1. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bandung
2. Objek penelitian adalah fasilitas perpindahan moda bagi pengguna jasa angkutan umum yang melintas di jalan tol.
3. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ialah *Multi Criteria Decision Making* dan *Analytical Hierarchy Process*

F. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Daftar penelitian pembandingan

No	Judul	Tahun	Penulis	Keterangan
1	Analisis Trade-Off Sebagai Alat Analisis Kebijakan Publik	2012	Kismartini	Menggunakan analisis multikriteria dalam menentukan pembobotan dalam mengambil kebijakan publik.
2	Prospek Penerapan Metode Analisis Multi Kriteria dalam Mengevaluasi Proyek Transportasi	1998	Rudy Hermawan Karsaman	Membuktikan bahwa metode analisis multi kriteria dapat digunakan dalam mengevaluasi suatu proyek transportasi dengan tetap memperhatikan jumlah kriteria yang digunakan terutama yang berhubungan dengan kendala waktu, biaya dan keterbatasan dalam hal pengolahan dan analisis data
3	Perancangan Stasiun kereta api terpadu dengan terminal bus di Semarang	2015	Teshanda, et,al	Melakukan pemisahan zona dalam merancang stasiun kereta api terpadu menjadi tiga yaitu ruang publik, privat dan semi publik.
4	Prinsip-prinsip Transit Oriented Development (TOD) Pantai, berbasis	2015	Arief, et.al	Menggunakan prinsip TOD dalam menentukan pengembangan kawasan

No	Judul	Tahun	Penulis	Keterangan
	Potensi Pelabuhan Rakyat Kayu Bangkoa, Makassar			Pelabuhan Rakyat Bengkulu.
5	Transit Oriented Development (TOD) Sebagai Solusi Alternatif Dalam Mengatasi Permasalahan Kemacetan Di Kota Surabaya	2014	Muhamad Hidayat Isa	Menggunakan prinsip TOD dalam menyelesaikan permasalahan transportasi di Kota Surabaya.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terdapat banyak sekali perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode analisis menggunakan *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam mengetahui konsep integrasi yang paling tepat untuk lokasi penelitian. Data yang digunakan berdasarkan kuesioner yang dibuat sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Output dari penelitian ini berupa akan diketahui konsep integrasi yang paling tepat untuk lokasi penelitian sebagai prasarana untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.